BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasakan pedoman pada Permenpan 53 tahu 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Pembangunainerja dan Tata cara Rivur atas laporan kinerja Instansi Pemerintahan, Dapat dijelaskan bahwa LKIJP tahun 2024 bertujuan untuk Pembangunan di Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan rangkaian upaya untuk merealisasikan amanat konstitusi. Yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan tersebut hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. antara lain meliputi pembangunan fisik / radikal dan mental / batinia untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan, baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku pembangunan.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pembangunan itu telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka perlu kiranya di buatkan suatu laporan yang berisi tentang hasil kegiatan pembangunan dan evaluasinya agar dapat diketahui keberhasilannya ataupun kekurangannya. Dengan harapan kedepannya dapat dilakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan No 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial adalah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan Pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;

6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
7. Pelaksanaan kegiatan peñatausahaan Dinas Sosial.

Berikut bagan struktur organisasi yang tertera pada Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan

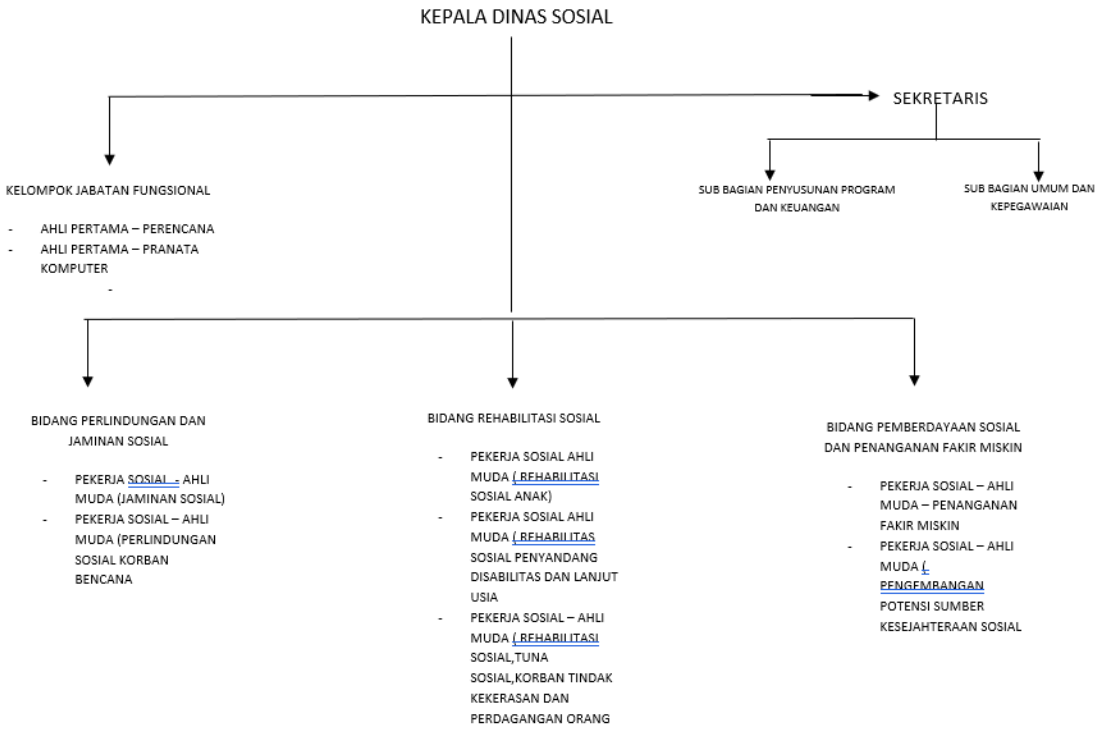

1.2.2 Anggaran

Besaran anggaran yang dimiliki Dinas Sosial sesuai dengan usulan masyarakat melalui musrenbang serta menyesuaikan kebutuhan dinas. Sumber anggaran berasal dari APBD yang tertuang pada DPPA tahun 202.

Tabel 1.12 Perbandingan Anggran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2022	Rp. 28.155.762.151
APBD	2023	Rp. 23.225.614.597

Sumber : Dokumen DPPA tahun 2022 dan 2023

1.2.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan pelayanan yang optimal di bidang sosial, karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kota Pasuruan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial
   a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Balita dan anak
   b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Rentan dan Termarjinalkan (Kelompok usia produktif dengan resiko tertentu)
   c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
   d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang dengan Disabilitas (ODD)

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   A. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terdiri dari :
   a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membangun keluarga produktif
   b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
   c. Program Keluarga Harapan (PKH)

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   a. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial.
   b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat.
   c. Pembinaan Karang Taruna dan Karang Wherda.
   d. SK/PSM sudah ada disetiap kecamatan/kelurahan namun belum optimal bersinergi dan belum terpadu melaksanakan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial KotaPasuruanTahun 2022 disusun beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan No 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis pada Dinas Sosial Kota Pasuruan, dan sistematika penyajiannya.

BAB II **Perencanaan Kinerja**

Memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023.

BAB III **Akuntabilitas Kinerja**

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Target Sasaran Strategis tahun 2024, juga evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024 yang diuraikan per sasaran strategis dan akuntabilitas anggaran, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya.

BAB IV **Penutup**

Berisi kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN **1.PK (Perjanjian Kinerja) 2024**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabarandari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam halini Dinas Sosial Kota Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nomor :188/79/423.105/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan PerubahanTahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan//kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebutditujukan untuk mewujudkanvisi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai suatu system perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pasuruan dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Pasuruan dan stakeholders.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Walikota dan Wakil Walikota beserta segenap aparatur sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan di Kota Pasuruan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pasuruan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

masalah yang tinggi harus mampu di bangun menuju ***PASURUAN KOTA MADINAH " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya "***

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah Misi I dan Misi III, yaitu :

Misil : *Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.*

Misi III: *Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid-19 yang Tangkas.*

Misi Dinas Sosial yang mendukung capaian Visi Walikota Pasuruan adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah sosial;
b. Terwujudnya peningkatan dan perluasan pembangunan kesejahteraans osial oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapaidari Visi dan Misi diatas adalah :

- Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosialdasar (PPKS)

Sasaran adalah penjabarandari tujuan, yaitu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasisosial. Idealnya sasaran dapat dijabarkan secara kuantitatif sehingga dapat diukur pencapaiannya. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara focus, efektif dan efisien.

Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);

Tujuan dan Sasaran pada Dinas Sosial diatas sudah mengalami perubahan yang didasarkan oleh rekomendasi nara sumber Kemenpan RB, Tim SAKIP Kota dan Bapelitbangda Kota Pasuruan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1	Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)	Persentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasar	Mengukur PPKS yang telah Pra Sejahtera	5%	5%	5%	5%	5%
	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	90%	92%	95%	97%	99%
	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip PD	Penilaian atas Fakta Objektif Pemerintahan dalam mengimplementasi Sistim Akuntanbilitas Kinerja			75		
	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yang ditindaklanjti dibandingkan dengan Total temuan			100 %		

			APEP dan APIP					

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kota Pasuruan Periode 2021 – 2026

Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Berikut adalah Formula IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
						DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4				
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)	1.1	Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	Mengukur PPKS yang telah Pra Sejahtera	%	Mengukur PPKS yang telah Pra sejahtera	Jumlah PPKS Prioritas yang mandiri tahun n / Jumlah Total Jumlah PPKS Prioritas tahun n PPKS x 100 %	5%
2	Meningkatnya Layanan Pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.2	Meningkatnya Layanan Pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	Mengukur PPKS yang terakses layanan dasar, sehingga permasalahan kesejahteraan sosial dapat tertangani dengan baik	Jumlah sasaran PPKS yang terakses layanan sosial dasar / Jumlah Total PPKS x 100 %	92%
3		1.3	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Persenase rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	%	Persenase rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Capaian indikator program / jumlah indikator program	100%
4		1.4	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip PD	Nilai	Penilaian atas Fakta Objektif Pemerintahan dalam Mengimplementasikan Sistem Akuntanbilitas Kinerja	Nilai Sakip	75
5		1.5	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	%	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	Temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah Temuan x 100 %	100

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

Dinas Sosial merumuskan formulasi rumusan perhitungan dalam kinerjanya meliputi perhitungan PPKS pra Sejahtera 5%, Nilai sakip 75, Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 100% dan Mengukur PPKS yang terakses layanan dasar sehingga permasalahan kesejahteraan sosial dapat tertangani dengan baik 92%.

2.2. Rencana Kinerja tahun 2023

Tujuan dan Sasaran beserta indikator selaras denga Renja PD yang dituangkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)	1.1	Persentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasar	Persentase Peningkatan PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	%	5
	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1.2	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	92
		1.3	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	%	100
		1.4	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip PD		75
		1.5	Meningkatnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	%	100

			Pelayanan Prima			

Sumber :Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023

Dinas Sosial merumuskan formulasi rumusan perhitungan dalam kinerjanya meliputi perhitungan PPKS pra Sejahtera 5%, Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD 100 %,Nilai sakip 75, Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 100% dan Mengukur PPKS yang terakses layanan dasar sehingga permasalahan kesejahteraan sosial dapat tertangani dengan baik 92%.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Target kinerja pada tingkat Sasaran Strategis akan menjadi tolak ukur tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	Mengukur PPKS yang telah Pra Sejahtera	5%
2	Meningkatnya Layanan Pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92%
3	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	100 %
4	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai Sakip PD	75

5	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	100 %

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

Dinas sosial melalui perjanjian kinerja tahun 2023 memilki perhitungan PPKS pra Sejahtera 5%, Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD 100 %Nilai sakip 75, Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 100% dan Mengukur PPKS yang terakses layanan dasar sehingga permasalahan kesejahteraan sosial dapat tertangani dengan baik 92%.

Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan berdasarkan DPPA 2023 Dinas Sosial dijelaskan pada tabel di bawah ini :

PROGRAM			**ANGGARAN**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Rp. 7.887.595.800,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial		Rp. 7.887.595.800,00
3.	Pogram Rehabilitasi Sosial		Rp. 1.630.816.260,00
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp. 7.548.627.175,00
5.	Penanganan Bencana		Rp. 372.621.260,00
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Rp. 104.025.560,00
	Jumlah		Rp. 18.424.515.759,00

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023

Berdasarkan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dijelaskan anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table dibawah ini

Tabel 2.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	TARGET
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yag tersusun tepat waktu**	**100%**

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**

		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Satuan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	191 Laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Satuan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Satuan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Satuan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan** **Persentase PSKS yang Aktif**	100 % 85%
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kota Pasuruan yang terdata	100 % 85%
		Peningkatan Kemampuan Potensi PekerjaSosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6494 Keluarga
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga

		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar**	9,2%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9,2 %
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
		Rehabilitasi SOsial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	9,2 %
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang

		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
		Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1657 Orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	**Persentase DTKS yang di update**	**1,85%**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6452 Keluarga
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7629 Keluarga

		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban bencana yang tertangani**	**57%**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	57%
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 Orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Satuan

		Penanganan Khusus Bagi KelompokRentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57%
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**1,9%**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	211 Makam

Sumber : Dokumen Pelanksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

PROGRAM		**ANGGARAN**

1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Rp. 7.887.595.800,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial		Rp. 7.887.595.800,00
3.	Pogram Rehabilitasi Sosial		Rp. 1.630.816.260,00
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp. 7.548.627.175,00
5.	Penanganan Bencana		Rp. 372.621.260,00
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Rp. 104.025.560,00
	Jumlah		Rp. 18.424.515.759,00

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kndisi sebagai berikut :

1. Terjadi perganyian atau mutasi pejabata;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pada Dina Sosial Kota Pasuruan

Pada tanggal 2 Oktober 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan Prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial Kota Pasuruan dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	
1	Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	Mengukur PPKS yang telah Pra Sejahtera		5%
2	Meningkatnya Layanan Pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92%	92%
3	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	100 %	100 %

4	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai Sakip PD	75	75
5	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

Dinas sosial melalui perjanjian kinerja tahun 2023 memilki perhitungan PPKS pra Sejahtera 5%, Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD 100 %, Nilai sakip 72, Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 100% dan Mengukur PPKS yang terakses layanan dasar sehingga permasalahan kesejahteraan sosial dapat tertangani dengan baik 92%.

Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan berdasarkan DPPA 2023 Dinas Sosial dijelaskan pada tabel di bawah ini :

PROGRAM			**ANGGARAN**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Rp. 5.812.683.954,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial		Rp. 13.858.488.800,00
3.	Pogram Rehabilitasi Sosial		Rp. 2.444.950.180,00
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp. 1.990.194.300,00
5.	Program Penanganan Bencana		Rp. 221.231.460,00
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Rp. 56.007.260,00
	Jumlah		Rp. 24.383.555.954,00

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023

Berdasarkan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dijelaskan anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table dibawah ini

Tabel 2.7. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Traget
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yag tersusun tepat waktu**	**100%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Satuan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	191 Laporan

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Satuan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Satuan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Satuan

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan** **Persentase PSKS yang Aktif**	100 % 85%
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kota Pasuruan yang terdata	100 % 85%
		Peningkatan Kemampuan Potensi PekerjaSosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6494 Keluarga

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar**	9,2%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9,2 %
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
		Rehabilitasi SOsial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	9,2 %

		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
		Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1657 Orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	**Persentase DTKS yang di update**	1,85%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6452 Keluarga

		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7629 Keluarga
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4884 Orang
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban bencana yang tertangani**	0.57
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0.57
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 Orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Satuan
		Penanganan Khusus Bagi KelompokRentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0.57
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	1,9%

		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	211 Makam

Sumber : Dokumen Pelanksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

PROGRAM			**ANGGARAN**	
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Rp.	5.360.981.915,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial		Rp.	7.887.595.800,00
3.	Pogram Rehabilitasi Sosial		Rp.	1.965.007.460,00
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp.	7.548.627.175,00
5.	Program Penanganan Bencana		Rp.	221.231.460,00
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Rp.	104.025.560,00
	Jumlah		Rp.	23.238.859.170,00

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023

Berdasarkan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dijelaskan anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table dibawah ini

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akutabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori / Interprestasi	Rata – Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber :Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasill pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pencapaian IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%	KATAGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	100%	Baik	

2	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92%	80,44%	87,43%	Baik	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	Baik	
4	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	75	75	100%	Baik	
5	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Baik	

Sumber :LKPJ Tahun 2023

Dari tabel tersebut diatas, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap keberhasilan capaian kinerja serta rencana aksi akan dijelaskan pada masing masing IKU Dimana Pada Sasaran Startegis memiliki Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dasar (PPKS) dimana memliki dua Indikator yaitu 1. Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya memiliki target 5% realisasinya 5% capaian 100% memiliki katagori baik sumber data yanng diambil dari bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2. Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasarnya memiliki target 92 % Realisasi nya 80,44% capaiannya 87,43 % memiliki katagori baik sumber data yanng diambil dari bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial, berikutnya Sasaran Strategis Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator yaitu : 1. Persentase rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran memiliki target 100% realisasi 100% capaian

100%, 2. Nilai SAKIP SKPD target 75 realisasi 75 capaian 100%, 3. Persentaase Temuan anggaran yang ditindaklanjuti 100% realisasi 100% capaian 100%

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalampelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis kinerja dengan cara membandingkan antara outputs dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai input dengan output.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelu,mya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	5%	5%	100%
2	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	57,05 %	98,2 %	92%	80,44 %	87,43 %

3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD			100%	100%	100%
4	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD			75	75	100%
5	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%

Sumber Data : LKJIP 2021,2022

Dari tabel tersebut diatas, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap keberhasilan capaian kinerja serta rencana aksi akan dijelaskan pada masing masing IKU Dimana Pada Sasaran Startegis memiliki Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dasar (PPKS) dimana memliki dua Indikator yaitu 1. Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya memiliki target 5% realisasinya 5% capaian 100% memiliki katagori baik sumber data yanng diambil dari bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2. Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasarnya memiliki target 92 % Realisasi nya 80,44% capaiannya 87,43 % memiliki katagori baik sumber data yanng diambil dari bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial, berikutnya Sasaran Strategis Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator yaitu : 1. Persentase rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran memiliki target 100% realisasi 100% capaian 100%, 2. Nilai SAKIP SKPD target 75 realisasi 75 capaian 100%, 3. Persentaase Temuan anggaran yang ditindaklanjuti 100% realisasi 100% capaian 100%

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja samapai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota PasuruanTahun 2023 dengan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing Indikator kinerja sasaran.
Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator kegiatan tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel di bawah :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Startegis

NO	TUJUAN/SASARAN	INIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN2023	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	100
2	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	80,44%	92%	87,43 %
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100
4	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	75	75	100
5	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Sumber : LKJIP 2023

Rata-rata perbandingan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya sampai dengan realisasi tahun berjalan untuk Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani adalah 80,44 % data perbandingan tersebut mencerminkan bahwa untuk tingkat kemajuan Tahun 2023 adalah Baik

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan reaisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KERJA	REALISASI 2023	STANDART PROVINSI/NAMA DAERAH	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%		
2	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	80,44%		
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD	100%		
4	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	75		
5	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%		

Sumber :Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan Th 2023

Dilihat dari Rencana Strategis Kota Pasuruan Sasaran Startegis memiliki Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dasar (PPKS) dimana memliki dua Indikator yaitu 1. Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya memiliki realisasinya 5%, 2. Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasarnya memiliki Realisasi nya 80,44% Belum ada Pembanding antara Dinas Sosial Provinsi dan Daerah Lainnya, Dikarenakan belum menerbitkan LKJiP tahun 2023,

berikutnya Sasaran Strategis Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator yaitu : 1. Persentase rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran memiliki realisasi 100%, 2. Nilai SAKIP SKPD realisasi 75, 3. Persentaase Temuan anggaran yang ditindaklanjuti realisasi 100% sedangkan pada Kabupaten Pasuruan memiliki rencana strategis. Pada tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi merealisasi kan 25,43 % dan Dinas Sosial Malang pada tahun 2023 merealisasikan 75,20 %

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGIATAN	SOSUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	100%	Ketercapaian ini didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan Serta ketersediaan dana maupun sumberdaya manusia yang terpenuh Kuantitas dan Kualitasnya	

2	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92%	80,44%	87,43 %	Ketercapaian ini didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan Serta ketersediaan dana maupun sumberdaya manusia yang terpenuh Kuantitas dan Kualitasnya	
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	Program Penunjang Sekretariat	
4	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	75	75	100%	Program Penunjang Sekretariat	
5	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Program Penunjang Sekretariat	

Sumber : Monev 2023

Keterangan : Analisisi pada Dinas Sosial Sosial Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS) yang memiliki Indikator Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya teralisasi 100 %, Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang memiliki Indikator Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar memiliki target 92 % teralisasi 80,44 % dengan

capaian 87,42 % dikarenkan Ketercapaian ini didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan Serta ketersediaan dana maupun sumberdaya manusia yang terpenuh Kuantitas dan Kualitasnya, dan untuk Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima yang memiliki 3 (Tiga) Indikator meliputi : 1. Persentase Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD,2. Nilai SAKIP SKPD,3. Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti teralisasi 100 %

3.1.7 Analisis Atas EfisiensiPenggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumberdaya disajikan pada table berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan AnggaranTujuan dan Sasaran :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial dasar (PPKS)	Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	100	24.055.295.545	17.713.282.070	73,64	35,8%
2	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Presentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92 %	80,44 %	87,43	24.055.295.545	17.713.282.070	73,64	18,7%
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin	Presentase rata-rata ketercapaian Pelaksa	100 %	100 %	100	5.812.676.414	4.777.328.504	82,2	21.7%

	pelayanan prima	naan Program Dukung an sasaran							
4	Meningkatn ya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai Sakip SKPD	75%	75%	100	5.812.6 76.414	4.777.32 8.504	82,2	21.7%
5	Meningkatn ya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persent ase Temuan Anggara n yang ditindakl anjuti	100 %	100%	100	5.812.6 76.414	4.777.32 8.504	82,2	21.7%

Sumber : LKPJ 2023

Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial dasar (PPKS) memiliki indikator Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya target 5 % realisasi 5 % capaian 100 dengan anggaran Rp. 24.055.295.545 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) teralisasi Rp. 17.713.282.070 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah) capaian 73,64 dan Tingkat efisensinya 35,8%, Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar tidak bisa sesuai yang ditargetkan 92 % teralisasi 80,44 % capainnya 87,43 , Bantuan sosial tidak bisa tersalurkan semua dikarenakan penerima bantuan setelah diverifikasi tidak layak menerima bantuan, Pindah, atau Tidak ditemukan Ketika diverifikasi lapangan oleh petugas lapangan Dinas Sosial yang memiliki anggaran Rp. 24.055.295.545 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) teralisasi Rp. 17.713.282.070 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah) dengan capaian 73,64 dan Tingkat efisiensinya 21,7 % , Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator Persentase rata-rata ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran target 100% realisasi 100 % capaian 100 dengan anggaran Rp. 5.812.676.414 (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah dengan realisasi Rp. 4.777.328.504 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah dengan capaian 82,2 dan

efisiensi 21,7 %, Nilai Sakip SKPD target 75 realisasi 75 capaian 100 dengan anggaran Rp. 5.812.676.414 (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah dengan realisasi Rp. 4.777.328.504 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah dengan capaian 82,2 dan efisiensi 21,7 %, Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti target 100% realisasi 100 % capaian 100 dengan anggaran Rp. 5.812.676.414 (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah dengan realisasi Rp. 4.777.328.504 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah dengan capaian 82,2 dan efisiensi 21,7 %.

3.1.8 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerjadi serta uraian penjelasan tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	**(8)**	**(9)**
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Persentase peningkatan PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5 %	Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Persentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5 %	Menunjang	
2	Meningkatnya layanan pemerlu Pelayan	Persentase PPKS yang terakses	92 %	Meningkatnya layanan pemerlu Pelaya	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	80,44%	Menunjang	

	an Kesejahteraan Sosial (PPKS)	layanan sosial dasar		nan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
3				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif**	100 %	Menunjang	
4				***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota***	***Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya***	100 %		
5				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar**	100 %	Menunjang	
6				**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlant**	**Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial**	100 %	Menunjang	

				ar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
7				**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial**	100 %	Menunjang	
8				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase DTKS yang di update**	100 %	Menunjang	
9				**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah**	**Persentase DTKS yang di update**	100 %	Menunjang	

				Kab/Kota				
10				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban bencana yang tertangani**	100 %	Menunjang	
11				**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota**	**Persentase Korban yang tertangani**	100 %	Menunjang	
12				**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota**	**Jumlah Rapat Koordinasi anggotaTaruna Siaga Bencana kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana**	100 %	Menunjang	
13				**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM**	**Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	100 %	Menunjang	

				PAHLAWAN				
14				**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	100 %	Menunjang	

Sumber : Monev 2023

Dari tabel diatas hamper seluruh program dan kegitan menunjang dan terlaksana sesuai target yang ditetapkan kecuali Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar yang ditargetkan 92 % realisasi 80,44% dikarenakan penyaluran bantuan sosial tidak bisa direalisasikan semua dengan alasan 1. Setelah diverifikasi lapangan calon penerima bantuan dinyatakan tidak layak menerima bantuan, 2. Calon Penerima Ketika diverifikasi lapangan dinyatkan sudah pindah oleh RT setempat, 3. Ketika diverifikasi oleh petugas Dinas Sosial tidak ditemukan dirumahnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Anggaran Program dan Kegiatan Capaian

Program / Kegiatan	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Capaian**
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Rp22.904.667.970	Rp.17.713.282.070	100%

Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp22.904.667.970	Rp.17.713.282.070	87,43%
Program Pemberdayaan Sosial	Rp 7.887.595.800	Rp7.437.819.690	94,30%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.630.816.260	Rp 1.448.332.492	88,81%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp7.548.627.175	Rp 4.428.548.093	58,67%
Program Penanganan Bencana	Rp372.621.260	Rp 215.121.830	57,73%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp104.025.560	Rp101.993.450	98,05%

Sumber : Monev 2023

Program Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS) dengan anggaran Rp. 24.055.295.545 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) teralisasi Rp. 17.713.282.070 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah) capaian 100, Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar tidak bisa sesuai dengan anggaran Rp. 24.055.295.545 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) teralisasi Rp. 17.713.282.070 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah) dengan capainnya 87,43, Program Pemberdayaan Sosial anggaran Rp 7.887.595.800 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) realisasi Rp7.437.819.690 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan capaian 94,30%, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp 1.630.816.260 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) realisasi Rp 1.448.332.492 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan

Puluh Dua Rupiah) dengan capaian 88,81%, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp7.548.627.175 (Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan capaian 58,67%, Program Penanganan Bencana dengan anggaran Rp372.621.260 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah realisasi Rp 215.121.830 (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan capaian 57,73%, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan anggaran Rp104.025.560 (Seartus Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) realisasi Rp101.993.450 (Seratus Satu Juta Rupiah Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Capaian 98,05%

BAB IV
P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik sebagai upaya untuk penyelenggaraanp pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Demikian yang dapat dilaporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.

Pasuruan, Februari 2024

Mengetahui/ Menyetujui
Dinas Sosial Kota pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760919 199602 1 003

Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 03 Januari 2023

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL
SAIFULLAH YUSUF	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM NIP. 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

AMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92%
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	70
3.	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP OPD	75

	PROGAM		ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	13.858.488.800,00	APBD
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	2.444.950.180,00	APBD
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	1.990.194.300,00	APBD
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	221.231.460,00	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp	56.007.260,00	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp	5.812.683.954,00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**24.383.555.954,00**	

Pasuruan, 03 Januari 2023

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP. 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL /14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML						
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1.	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar						92						92						92						92		92					
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)										70																70					
3.	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima											75																80					
CAPAIAN OUTPUT																																	
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																	

	PROGAM		ANGGARAN	KETERANGAN
	...GRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	13.858.488.800,00	APBD
	...GRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	2.444.950.180,00	APBD
	...OGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	1.990.194.300,00	APBD
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	221.231.460,00	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp	56.007.260,00	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp	5.812.683.954,00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**24.383.555.954,00**	

Pasuruan, 03 Januari 2023

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP. 197609191996021003

Lampiran

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL
SAIFULLAH YUSUF	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM NIP. 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%
2.	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92%	92%
3.	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata rata Ketercapaian Pelaksanan Program Dukungan Sasaran SKPD	100%	100%
		Nilai SAKIP SKPD	75	75
		Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp13.858.488.800	Rp7.887.595.800	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp2.444.950.180	Rp1.630.816.260	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp1.990.194.300	Rp7.548.627.175	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp221.231.460	Rp372.621.260	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp56.007.260	Rp104.025.560	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp5.812.683.954	Rp5.360.981.915	APBD
JUMLAH		**Rp24.383.555.954**	**Rp22.904.667.970**	**APBD**

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP. 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP : 197609191996021003
PANGKAT / GOL. : PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML						
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	Persen					5						5						5						5		5					
2.	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	Persen					92						92						92						92		92					
3.	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Rata rata Ketercapaian Pelaksanan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persen																							100		100					

| | | |

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 13.858.488.800	Rp7.887.595.800	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 2.444.950.180	Rp1.630.816.260	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 1.990.194.300	Rp7.548.627.175	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 221.231.460	Rp372.621.260	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp 56.007.260	Rp104.025.560	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp 5.812.683.954	Rp5.360.981.915	APBD
JUMLAH		**Rp 24.383.555.954**	**Rp22.904.667.970**	**APBD**

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP. 197609191996021003